SAKALIMA
PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN
VOL 3. NO. 2 (2026)

ISSN: 3064-2361

Gender dan Transformasi Pendidikan Islam dalam Tradisi Melayu: Kajian Literatur Kritis

Fitriyanti, Rahayu Suprati, Abdullah Idi, dan Abdillah Asmara

To cite this article Fitriyanti, Suprati, R., Idi, A., Asmara, A. Gender dan Transformasi Pendidikan Islam dalam Tradisi Melayu: Kajian Literatur Kritis. SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan, vol. 3, no. 2, pp. 131–140, 2026. https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.442

To link to this article:

Published online: June. 08, 2026

Submit your article to this journal

View crossmark data

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
https://journal.wiseedu.co.id/index.php/sakalima/about

OPEN ACCESS

https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.442

SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2026)

Check for updates

Research Article

Gender dan Transformasi Pendidikan Islam dalam Tradisi Melayu: Kajian Literatur Kritis

Fitriyanti, Rahayu Suprati, Abdullah Idi, Abdillah Asmara

Received: 27 Februari 2026	Revised: 23 April 2026	Accepted: 28 Mei 2026	Online: 8 Juni 2026

Abstract

This article examines gender relations and the transformation of Islamic education within Malay tradition. The study aims to analyze how Malay cultural values interact with Islamic educational reform and how gender relations are constructed, maintained, and transformed in educational institutions and community-based religious learning spaces. Using a qualitative library research design, this study reviews recent academic literature, policy-related documents, and conceptual studies on gender, Islamic education, and Malay culture published mainly between 2018 and 2026. Data were collected through documentation, literature tracing, and thematic note-taking, then analyzed using content analysis and descriptive-critical interpretation. The findings reveal that Islamic education in Malay society is undergoing a gradual transformation from traditional, male-dominated authority structures toward more adaptive, inclusive, and socially responsive educational practices. Women's access to Islamic education and participation in social-religious activities have increased, yet gender inequality persists in leadership, institutional authority, curriculum representation, and decision-making. The study further shows that Malay tradition does not necessarily obstruct gender justice; values such as deliberation, respect for knowledge, communal harmony, and public benefit can serve as cultural capital for developing gender-responsive Islamic education. The novelty of this article lies in positioning Malay tradition not merely as a cultural background but as an analytical framework for negotiating gender justice within Islamic education. The study implies the need for curriculum reconstruction, gender-sensitive teacher capacity building, expanded women's leadership, and stronger collaboration between Islamic educational institutions, families, and Malay customary communities.

Keywords: Gender Equity; Islamic Education; Malay Tradition; Social Transformation; Women Leadership

Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright:
©
2026 by the author(s).
License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0//).



PENDAHULUAN

Isu gender dalam pendidikan Islam semakin penting dibicarakan karena pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas, nilai sosial, dan relasi kuasa. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab tuntutan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi sosial tanpa kehilangan akar normatifnya. Literatur mutakhir tentang pendidikan Islam menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak dapat dipahami semata-mata sebagai agenda sosial modern, tetapi berkaitan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, penghargaan terhadap ilmu, serta tanggung jawab moral manusia sebagai subjek pendidikan [1], [2]. Dalam kerangka ini, laki-laki dan perempuan perlu diposisikan sebagai peserta didik, pendidik, dan aktor sosial yang memiliki kapasitas intelektual, spiritual, dan kepemimpinan yang setara.

Dalam tradisi Melayu, pendidikan Islam memiliki sejarah panjang melalui keluarga, surau, langgar, madrasah, pesantren, dayah, dan majelis taklim. Lembaga-lembaga tersebut bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk adab, kesantunan, solidaritas sosial, dan identitas budaya Melayu-Islam. Prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah menunjukkan bahwa budaya Melayu memiliki hubungan kuat dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, kuatnya tradisi lokal tidak selalu menghasilkan relasi gender yang setara. Dalam beberapa konteks, pembagian peran domestik-publik, stereotip kepemimpinan laki-laki, dan terbatasnya pengakuan terhadap otoritas keagamaan perempuan masih mewarnai praktik pendidikan dan kehidupan sosial-keagamaan [3], [4].

Kajian-kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perempuan Muslim semakin aktif dalam pendidikan, dakwah, organisasi sosial-keagamaan, dan kepemimpinan komunitas. Beberapa studi menekankan pentingnya pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender, pengarusutamaan gender dalam Pendidikan Agama Islam, serta kebutuhan rekonstruksi kurikulum agar tidak mereproduksi bias patriarkal [5], [6], [7]. Studi lain memperlihatkan bahwa perempuan ulama dan pendidik perempuan memiliki kontribusi penting dalam transmisi ilmu, pembentukan otoritas keagamaan, dan penguatan pendidikan Islam yang inklusif [8], [9]. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih membahas gender dan pendidikan Islam dalam konteks umum, belum secara khusus menempatkan tradisi Melayu sebagai ruang budaya yang memiliki karakter, simbol, otoritas adat, dan nilai sosial tersendiri. State of the art kajian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga wilayah diskusi yang selama ini sering dibahas secara terpisah, yaitu perspektif gender, transformasi pendidikan Islam, dan tradisi Melayu. Kajian tentang gender dalam pendidikan Islam umumnya menyoroti akses, partisipasi, kurikulum, dan stereotip. Kajian tentang transformasi pendidikan Islam lebih banyak membahas modernisasi lembaga, integrasi ilmu, digitalisasi, atau reformasi kurikulum. Sementara itu, kajian tentang Melayu-Islam sering berfokus pada sejarah, adat, dakwah, dan identitas budaya. Celah penelitian muncul karena belum banyak kajian yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya Melayu dapat menjadi faktor yang membatasi sekaligus membuka peluang bagi transformasi pendidikan Islam yang berkeadilan gender [10], [11].

Dengan demikian, artikel ini berangkat dari argumen bahwa tradisi Melayu tidak dapat ditempatkan secara sederhana sebagai penghambat kesetaraan. Tradisi lokal dapat memuat struktur patriarkal, tetapi pada saat yang sama juga menyimpan modal budaya yang kuat untuk mengembangkan pendidikan Islam yang inklusif, seperti musyawarah, penghormatan terhadap ilmu, keseimbangan sosial, gotong royong, dan kemaslahatan bersama. Karena itu,

transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu perlu dipahami sebagai proses negosiasi antara teks keagamaan, budaya lokal, kebijakan pendidikan, perubahan sosial, dan kesadaran gender [12].

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk relasi gender dalam pendidikan Islam tradisi Melayu, menganalisis transformasi lembaga, kurikulum, dan otoritas pendidikan Islam dalam konteks perubahan sosial, serta merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam berbasis tradisi Melayu yang responsif gender. Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan tradisi Melayu sebagai kerangka analitis, bukan sekadar latar budaya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan model konseptual bahwa pendidikan Islam berkeadilan gender dapat dibangun melalui sintesis antara nilai Islam, budaya Melayu, dan prinsip kesetaraan sosial kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang berfokus pada penelaahan konsep, wacana, hasil penelitian, dan dokumen ilmiah mengenai gender, pendidikan Islam, dan tradisi Melayu. Studi kepustakaan digunakan untuk membangun sintesis konseptual yang tidak hanya mendeskripsikan literatur, tetapi juga menafsirkan hubungan antara nilai budaya, otoritas keagamaan, perubahan lembaga pendidikan, dan konstruksi gender dalam masyarakat Melayu. Ruang kajian penelitian ini adalah tradisi Melayu di Indonesia dan kawasan serumpun yang memiliki akar kuat dalam Islam, terutama Sumatra, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Malaysia, Brunei, dan sebagian Thailand Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup wacana akademik tentang gender, lembaga pendidikan Islam, praktik sosial-budaya Melayu, representasi perempuan dalam pendidikan, dan strategi transformasi pendidikan Islam berkeadilan gender.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, Crossref, dan laman jurnal yang relevan. Kata kunci yang digunakan meliputi gender dan pendidikan Islam, kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam, perempuan dan pendidikan Islam, kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam, tradisi Melayu dan Islam, Islam Melayu, modernisasi pendidikan Islam Melayu, serta Malay Islamic education and gender. Literatur yang diprioritaskan adalah artikel jurnal terbitan 2018-2026, memiliki DOI atau identitas publikasi yang jelas, relevan dengan fokus kajian, dan berasal dari jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional bereputasi. Buku dan dokumen pendukung digunakan secara terbatas untuk memperkuat konteks historis dan konseptual.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: sumber membahas gender, pendidikan Islam, tradisi Melayu, otoritas perempuan, transformasi kurikulum, atau lembaga pendidikan Islam; terbit dalam rentang waktu terbaru; memiliki kontribusi konseptual atau metodologis; dan dapat diverifikasi melalui identitas jurnal, DOI, atau penerbit akademik. Kriteria eksklusi adalah sumber yang tidak memiliki identitas publikasi jelas, tidak relevan dengan topik, bersifat opini populer tanpa dasar akademik, serta sumber yang hanya mengulang konsep tanpa kontribusi analitis. Proses seleksi dilakukan melalui pembacaan judul, abstrak, kata kunci, dan isi artikel secara bertahap.

Tabel 1. Strategi Penelusuran dan Seleksi Literatur

Aspek	Keterangan	Fungsi dalam Kajian	Status
Basis data	Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, Crossref, dan laman jurnal	Menelusuri artikel nasional dan internasional	Digunakan
Kata kunci	gender, pendidikan Islam, tradisi Melayu, perempuan ulama, kepemimpinan perempuan, Malay Islamic education	Memperluas cakupan literatur	Digunakan
Kriteria inklusi	Relevan, terbit 2018-2026, memiliki DOI/identitas jurnal, peer-reviewed atau akademik	Menjamin kemutakhiran dan kredibilitas	Digunakan
Kriteria eksklusi	Opini populer, metadata tidak lengkap, tidak relevan, atau tidak dapat diverifikasi	Mencegah penggunaan sumber lemah	Digunakan
Teknik analisis	Content analysis dan deskriptif-kritis	Menghasilkan kategorisasi tematik dan sintesis konseptual	Digunakan

Data dianalisis menggunakan content analysis dan analisis deskriptif-kritis. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola tematik, seperti akses pendidikan, partisipasi sosial-keagamaan, kepemimpinan perempuan, representasi kurikulum, dan nilai budaya Melayu. Analisis deskriptif-kritis digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, dan relevansi temuan literatur terhadap transformasi pendidikan Islam yang berkeadilan gender. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan artikel jurnal, buku akademik, dokumen kebijakan, dan temuan penelitian terdahulu agar sintesis yang dihasilkan tidak bergantung pada satu sumber saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemetaan Tematik Literatur

Hasil penelaahan literatur menunjukkan bahwa isu gender dan transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu dapat dipetakan ke dalam lima tema utama. Pertama, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan Islam. Kedua, perluasan partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial-keagamaan dan pendidikan komunitas. Ketiga, ketimpangan kepemimpinan dan otoritas keagamaan yang masih didominasi laki-laki. Keempat, perlunya rekonstruksi kurikulum agar lebih responsif terhadap isu gender. Kelima, potensi nilai budaya Melayu sebagai modal sosial untuk membangun pendidikan Islam yang inklusif. Pemetaan ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam tidak hanya terjadi pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut perubahan wacana, relasi kuasa, dan representasi pengetahuan.

Tabel 2. Pemetaan Temuan Literatur

Tema	Temuan Utama	Makna Analitis	Rujukan
Akses pendidikan perempuan	Perempuan semakin memperoleh ruang belajar di madrasah, pesantren, perguruan	Akses meningkat, tetapi belum otomatis menghasilkan distribusi otoritas yang setara.	[2], [5], [13]

Tema	Temuan Utama	Makna Analitis	Rujukan
	tinggi, dan majelis taklim.		
Partisipasi sosial-keagamaan	Perempuan aktif sebagai guru, dai, penggerak komunitas, dan pendidik keluarga.	Partisipasi informal sering lebih kuat daripada pengakuan formal kelembagaan.	[8], [9], [14]
Kepemimpinan dan otoritas	Kepemimpinan lembaga dan otoritas keputusan masih banyak dikuasai laki-laki.	Kesetaraan tidak cukup diukur dari akses; perlu dilihat distribusi kuasa.	[10], [15], [16]
Kurikulum dan pedagogi	Materi ajar masih berpotensi memuat stereotip peran gender, sehingga perlu rekonstruksi.	Kurikulum menjadi arena penting untuk membentuk kesadaran gender.	[3], [6], [7]
Nilai budaya Melayu	Musyawarah, adab, penghargaan pada ilmu, dan kemaslahatan dapat menjadi modal budaya.	Tradisi dapat direkonstruksi sebagai sumber legitimasi pendidikan inklusif.	[17], [18], [19]

Relasi Gender dalam Pendidikan Islam Tradisi Melayu

Relasi gender dalam pendidikan Islam tradisi Melayu menunjukkan pola yang ambivalen. Di satu sisi, perempuan memiliki akses yang semakin luas terhadap pendidikan formal dan nonformal [20], [21], [22]. Mereka hadir sebagai peserta didik, guru, pengelola kegiatan keagamaan, penggerak majelis taklim, dan pendidik utama dalam keluarga. Peningkatan ini sejalan dengan perkembangan pendidikan Islam kontemporer yang semakin terbuka terhadap partisipasi perempuan dan penguatan kapasitas sosial-keagamaan mereka [8], [13]. Di sisi lain, ruang kepemimpinan strategis masih cenderung dikuasai laki-laki, terutama dalam posisi pengambil keputusan, pimpinan lembaga, pengasuh pesantren, dan otoritas keagamaan formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi gender dalam pendidikan Islam Melayu belum selesai karena akses belum sepenuhnya diikuti oleh pengakuan otoritas [23], [24], [25].

Ketimpangan tersebut berkaitan dengan struktur sosial dan interpretasi budaya yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam ruang publik. Dalam sebagian masyarakat Melayu, pembagian peran domestik-publik masih dipengaruhi oleh tafsir sosial yang mengaitkan perempuan dengan fungsi pengasuhan dan laki-laki dengan kepemimpinan. Namun, temuan literatur juga menunjukkan bahwa konstruksi ini tidak bersifat tetap. Ketika perempuan memperoleh pendidikan tinggi, terlibat dalam organisasi keagamaan, dan memiliki kompetensi pedagogis, legitimasi sosial terhadap peran publik perempuan mulai meningkat [9], [15].

Transformasi Lembaga, Kurikulum, dan Otoritas Pendidikan Islam

Transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu tampak pada perubahan lembaga, kurikulum, dan pola otoritas. Lembaga pendidikan Islam yang dahulu lebih menekankan transmisi kitab, hafalan, dan pembentukan adab tradisional kini mulai mengintegrasikan ilmu umum, literasi digital, pendidikan karakter, moderasi beragama, dan isu sosial kontemporer. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam Melayu tidak statis, melainkan terus

beradaptasi dengan tuntutan zaman. Namun, proses adaptasi tersebut tidak berlangsung seragam. Lembaga di kawasan perkotaan cenderung lebih cepat menerima pendekatan inklusif, sedangkan lembaga di pedesaan sering lebih berhati-hati karena kuatnya otoritas adat dan keterbatasan sumber daya.

Pada aspek kurikulum, literatur menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam Pendidikan Agama Islam perlu dilakukan melalui materi ajar yang menampilkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral, intelektual, dan sosial yang setara [3], [6]. Rekonstruksi kurikulum tidak berarti menolak nilai Islam atau tradisi Melayu, tetapi menafsirkan kembali keduanya agar lebih responsif terhadap keadilan. Pada aspek otoritas, munculnya perempuan ulama, pendidik perempuan, dan aktivis dakwah digital memperlihatkan adanya pergeseran dari otoritas tunggal berbasis gender menuju otoritas berbasis kapasitas ilmu, moralitas, dan kontribusi sosial [8], [9].

Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Berkeadilan Gender

Berdasarkan sintesis literatur, strategi pengembangan pendidikan Islam berkeadilan gender dalam tradisi Melayu dapat diarahkan pada empat hal. Pertama, rekonstruksi kurikulum agar materi ajar tidak mereproduksi stereotip gender dan mampu menghadirkan narasi perempuan Muslim sebagai ulama, pendidik, pemimpin, dan aktor perubahan. Kedua, penguatan kapasitas pendidik melalui pelatihan pedagogi responsif gender, sehingga guru tidak hanya memahami materi agama, tetapi juga mampu mengelola kelas yang inklusif. Ketiga, perluasan ruang kepemimpinan perempuan dalam madrasah, pesantren, yayasan pendidikan, dan komunitas keagamaan. Keempat, kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat agar transformasi tidak dipahami sebagai ancaman terhadap tradisi, melainkan sebagai penguatan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam budaya Melayu [2], [5], [6].

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu tidak dapat dipahami hanya sebagai modernisasi kelembagaan, tetapi sebagai perubahan relasi sosial yang menyentuh akses, partisipasi, otoritas, kurikulum, dan legitimasi budaya. Temuan ini sejalan dengan Masyitoh dan Hidayanti yang menekankan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan Islam membutuhkan manajemen pendidikan yang mampu menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dalam ruang domestik maupun publik [2]. Akan tetapi, penelitian ini memperluas diskusi tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Melayu, kesetaraan tidak hanya berhadapan dengan struktur sekolah, tetapi juga dengan adat, otoritas sosial, dan nilai kolektif yang hidup di masyarakat [26], [27].

Temuan tentang pentingnya rekonstruksi kurikulum sejalan dengan Safitri dan Awalia yang menyatakan bahwa pengarusutamaan gender dalam Pendidikan Agama Islam perlu dilakukan melalui pembelajaran yang menghilangkan bias, subordinasi, dan stereotip [3]. Hasil kajian ini juga mendukung temuan Yaqin bahwa pendidikan agama berbasis gender membutuhkan pembaruan bahan ajar karena sebagian materi keagamaan masih dapat dibaca secara bias apabila tidak disertai perspektif keadilan [6]. Perbedaannya, artikel ini menekankan bahwa rekonstruksi kurikulum dalam masyarakat Melayu harus dilakukan secara kultural, yaitu dengan menghubungkan nilai kesetaraan dengan nilai musyawarah, adab, dan kemaslahatan agar lebih mudah diterima oleh komunitas lokal.

Temuan mengenai peningkatan partisipasi perempuan sekaligus keterbatasan otoritas formal sejalan dengan studi Norlaila, Nuryadin, dan Yaqin tentang peran perempuan ulama dalam pengembangan pendidikan Islam [8]. Studi tersebut menunjukkan bahwa perempuan ulama berkontribusi melalui kepemimpinan pesantren, pendekatan pendidikan inklusif, dan adaptasi dakwah digital. Temuan ini juga diperkuat oleh Salim yang menunjukkan bahwa perempuan ulama membangun otoritas pedagogis melalui keterlibatan berkelanjutan, kredibilitas moral, dan kemampuan mengajar yang adaptif dalam konteks masyarakat minoritas Muslim [9]. Dalam artikel ini, temuan tersebut dibaca dalam konteks Melayu bahwa otoritas perempuan tidak selalu hadir melalui struktur formal, tetapi sering tumbuh melalui ruang komunitas, keluarga, majelis taklim, dan pendidikan nonformal.

Temuan tentang kuatnya hambatan patriarkal juga memiliki keterkaitan dengan studi White et al. tentang patriarki politik, Islam, dan representasi perempuan di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa sikap patriarkal masih berpengaruh terhadap dukungan publik terhadap kepemimpinan perempuan [15]. Meskipun penelitian tersebut berada dalam ranah politik, implikasinya relevan bagi pendidikan Islam karena lembaga pendidikan juga merupakan ruang produksi nilai dan legitimasi sosial. Jika pendidikan terus mereproduksi gambaran bahwa kepemimpinan adalah wilayah laki-laki, maka ketimpangan representasi perempuan akan terus berlangsung. Sebaliknya, jika pendidikan Islam menampilkan perempuan sebagai subjek ilmu dan pemimpin moral, maka lembaga pendidikan dapat menjadi ruang koreksi terhadap budaya patriarkal [28], [29], [30].

Temuan mengenai tradisi Melayu sebagai modal budaya sejalan dengan kajian tentang transformasi pendidikan Islam dalam sejarah peradaban Islam Melayu yang menunjukkan bahwa pendidikan Melayu-Islam selalu mengalami adaptasi dari tradisi klasik menuju modernisasi [18]. Dengan demikian, tradisi Melayu tidak dapat dipahami sebagai entitas beku. Ia memiliki kemampuan adaptif sepanjang perubahan dibingkai dalam bahasa nilai yang dapat diterima masyarakat. Nilai musyawarah dapat menjadi dasar partisipasi perempuan, penghormatan terhadap ilmu dapat menjadi dasar pengakuan kapasitas intelektual perempuan, sedangkan prinsip kemaslahatan dapat menjadi dasar pembukaan ruang kepemimpinan yang lebih luas bagi perempuan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan tradisi Melayu sebagai kerangka analitis dalam membaca transformasi pendidikan Islam berbasis gender. Berbeda dari kajian yang hanya membahas kesetaraan gender dalam pendidikan Islam secara umum atau yang hanya mengkaji sejarah Islam Melayu, artikel ini mempertemukan keduanya dalam satu model konseptual. Model yang ditawarkan adalah pendidikan Islam responsif gender berbasis tradisi Melayu, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan nilai Islam, nilai budaya lokal, dan prinsip keadilan sosial dalam kurikulum, pedagogi, kepemimpinan, dan relasi kelembagaan.

Implikasi penelitian ini dapat dibaca pada tiga level. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian pendidikan Islam dengan menunjukkan bahwa kesetaraan gender perlu dianalisis secara kontekstual berdasarkan budaya lokal. Secara praktis, lembaga pendidikan Islam di kawasan Melayu perlu merevisi materi ajar, memperkuat kapasitas guru, membuka ruang kepemimpinan perempuan, dan mengembangkan kolaborasi dengan keluarga serta tokoh adat. Secara kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya dukungan regulatif dan program afirmatif agar pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan akses perempuan, tetapi juga memperkuat partisipasi dan otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian ini berbasis studi kepustakaan sehingga belum menggambarkan pengalaman empiris perempuan, guru, pimpinan lembaga, dan tokoh adat secara langsung. Kedua, tradisi Melayu memiliki wilayah dan karakter yang sangat beragam, sedangkan artikel ini masih membahasnya secara umum. Ketiga, sebagian literatur yang tersedia masih lebih banyak membahas gender dan pendidikan Islam secara nasional, belum secara spesifik pada komunitas Melayu. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan studi lapangan, etnografi pendidikan, wawancara mendalam, atau studi kasus pada lembaga pendidikan Islam di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan kawasan Melayu lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan Islam dalam tradisi Melayu tidak hanya berkaitan dengan perubahan lembaga, kurikulum, dan metode pembelajaran, tetapi juga mencerminkan perubahan relasi gender melalui dialog antara nilai Islam, budaya lokal, dan tuntutan modernitas. Temuan menunjukkan bahwa akses pendidikan perempuan dalam masyarakat Melayu semakin terbuka dan partisipasi mereka dalam aktivitas sosial-keagamaan terus meningkat, meskipun ketimpangan masih tampak pada aspek kepemimpinan, distribusi otoritas, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Melayu seperti musyawarah, penghormatan terhadap ilmu, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan bersama dapat menjadi modal kultural untuk membangun pendidikan Islam yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam di kawasan Melayu perlu memperkuat rekonstruksi kurikulum berbasis kesetaraan, meningkatkan kapasitas pendidik dalam pedagogi responsif gender, membuka ruang kepemimpinan yang lebih luas bagi perempuan, serta membangun kolaborasi dengan keluarga, masyarakat adat, dan pemangku kebijakan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan lapangan seperti studi kasus, etnografi, atau wawancara mendalam agar mampu menggambarkan pengalaman empiris masyarakat Melayu secara lebih kontekstual dan komprehensif.

INFORMASI PENULIS

Penulis Koresponden
Fitriyanti – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: fitriyantididik@gmail.com

Penulis
Fitriyanti – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: fitriyantididik@gmail.com
Rahayu Suprati – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: rahayusuprapti.pns@gmail.com
Abdullah Idi – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: Abdullahidi_uin@radenfatah.ac.id
Abdillah Asmara – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: muhammadabdillah@radenfatah.ac.id

KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. Boeren, "Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on 'quality education' from micro, meso and macro perspectives," *International Review of Education*, vol. 65, no. 2, pp. 277–294, 2019. https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7

[2] D. Masyitoh and D. M. Hidayanti, "Implementasi dan menejemen prespektif kesetaraan gender dengan pendidikan Islam," *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, vol. 8, no. 2, 2024. https://doi.org/10.31537/ej.v8i2.1927

[3] A. Safitri and R. Awalia, "Pengarusutamaan pendidikan gender dalam lingkup Pendidikan Agama Islam," *ILJ: Islamic Learning Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 76–95, 2025. https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v3i1.2026

[4] N. H. Aisyah and M. Junaedi, "Philosophical foundation and urgency of gender-equal Islamic religious education in Indonesia," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, vol. 8, no. 2, pp. 138–150, 2024. https://doi.org/10.30983/humanisma.v8i2.8730

[5] M. I. Amal, S. Luthfi, and K. A. Auliya, "Gender equality in Islamic education: Promoting democratic values and advancing SDGs 4 & 5," *Multicultural Islamic Education Review*, vol. 3, no. 2, 2025. https://doi.org/10.23917/mier.v3i2.12722

[6] M. A. Yaqin, "Pendidikan Agama Islam berbasis gender," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 5, 2024. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2228

[7] S. Mutmainah and N. Khasanah, "Towards gender-equitable religious education: A study of thought on the formation of gender equality in Islamic education," *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, vol. 3, no. 1, 2026. https://doi.org/10.70512/tatho.v3i1.157

[8] Norlaila, Nuryadin, and H. Yaqin, "The role of women ulama in the development of Islamic education," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, vol. 9, no. 2, pp. 261–273, 2025. https://doi.org/10.35723/ajie.v9i2.99

[9] A. Salim, "Female ulama and Islamic education in Manado: Pedagogical authority in a Muslim minority context," *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 13, no. 1, 2026. https://doi.org/10.19109/ejpp.v13i1.34085

[10] N. H. Azzahra, Tiara, and Kurniati, "Implementasi prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan perspektif hukum Islam," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 4, no. 4, 2026. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5762

[11] A. Mahya, H. N. Anantasya, A. N. Futikha, M. Afifah, and Siyono, "Inovasi pedagogis berbasis mazhab fiqih: Reformulasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang responsif terhadap kesetaraan gender," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 23, no. 4, 2025. https://doi.org/10.36835/jipi.v23i4.241

[12] S. Fauziah and N. K. Dewi, "Gender inequality in Islamic religious education," *Journal of Indonesian Progressive Education*, vol. 2, no. 1, pp. 31–40, 2025. https://doi.org/10.63617/jipe.v2i1.23

[13] B. F. Wiratama and Z. Safitri, "Measuring the development of Islamic education in Indonesia," *Muslim Education Review*, vol. 2, no. 1, pp. 27–41, 2023. https://doi.org/10.56529/mer.v2i1.161

[14] S. D. E. Nayab, "The role of women in contemporary Islamic education and da'wah," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 17, no. 1, 2026. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v17i1.4710

[15] S. White, E. Warburton, Pramashavira, A. Hendrawan, and E. Aspinall, "Voting against women: Political patriarchy, Islam, and representation in Indonesia," *Politics & Gender*, vol. 20, no. 2, pp. 391–421, 2024. https://doi.org/10.1017/S1743923X23000648
[16] F. M. Reimers, "The sustainable development goals and education, achievements and opportunities," *International Journal of Educational Development*, vol. 104, 2024. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102965
[17] S. Juwita, D. Takrim, Maryamah, and Zulhijra, "Transformasi Pendidikan Agama Islam dalam sejarah peradaban Islam Melayu: Dari tradisi keilmuan klasik menuju modernisasi pendidikan," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 11, no. 1, 2026. https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.44155
[18] H. Handoko, C. Islamiarso, A. Idi, and M. A. Asmara, "Transformasi pendidikan tasawuf dalam tradisi Islam Melayu di era modernitas," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 11, no. 2, 2026. https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.46578
[19] Zulkifli, L. V. Surianti, E. Sari, Yudafriyenti, Mursal, Rusydi, and R. Saputra, "Peran perempuan dalam sejarah pendidikan Islam: Tinjauan historis dan kontekstual," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 10, no. 2, 2025. https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25947
[20] D. Rad et al., "Pathways to inclusive and equitable quality early childhood education for achieving SDG4 goal: A scoping review," *Frontiers in Psychology*, vol. 13, 2022. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.955833
[21] S. Romlah, A. Imron, Maisyaroh, A. Sunandar, and Z. A. Dami, "A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning," *Cogent Education*, vol. 10, no. 2, 2023. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734
[22] M. Elfert, "Lifelong learning in Sustainable Development Goal 4: What does it mean for UNESCO's rights-based approach to adult learning and education?," *International Review of Education*, vol. 65, no. 4, pp. 537–556, 2019. https://doi.org/10.1007/s11159-019-09788-z
[23] A. N. Afifah, A. S. Nurmaidah, Fajriani, M. Azhar, and Hajam, "Internalisasi kesadaran gender dalam Pendidikan Agama Islam: Pendekatan holistik untuk pengembangan karakter," *Indonesian Journal of Action Research*, vol. 3, no. 1, 2024. https://doi.org/10.14421/ijar.2024.31-02
[24] A. Cahyadi, Hendryadi, S. Widyastuti, V. N. Mufidah, and Achmadi, "Emergency remote teaching evaluation of the higher education in Indonesia," *Heliyon*, vol. 7, no. 8, 2021. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07788
[25] R. Mulyani, "Perempuan dan pendidikan Islam di Indonesia kontemporer," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, vol. 6, no. 2, pp. 115–117, 2022.
[26] M. Fadli, "Kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 18, no. 1, pp. 44–46, 2023.
[27] N. Aisyah, "Modernisasi masyarakat Melayu dan perubahan relasi gender," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 17, no. 1, pp. 59–61, 2022.
[28] A. Rofiq, "Reformasi madrasah dan tantangan pendidikan Islam modern," *Edukasi Islami*, vol. 11, no. 3, pp. 201–204, 2021.
[29] L. Marlina, "Perspektif gender dalam pembaruan pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 72–75, 2023. https://doi.org/10.62214/jalfal.v1i1.50
[30] D. Sartika, "Nilai budaya Melayu dan pendidikan berkeadilan sosial," *Jurnal Kebudayaan Melayu*, vol. 8, no. 1, pp. 21–24, 2025.